

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Central Artha



**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA  
TAHUN 2022**

**PT. BPR CENTRAL ARTHA**

Jln. Dr. Soetomo No. 53 Kota Tegal

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR CENTRAL ARTHA  
TAHUN 2022**

PT. Bank Perkreditan Rakyat

**Central Artha**



**Jln. Dr. Sutomo No. 53 Kota Tegal  
TELEPON: 0283 - 341741**

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT. BPR Central Artha Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Central Artha selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

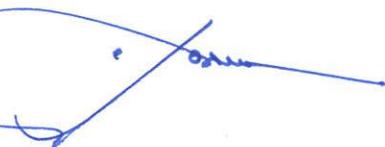
Tegal, 25 Januari 2023

**PT. BPR Central Artha**

  
**ISMIYANTO, S.H., M.H., M.M.**  
Direktur Utama

PT. Bank Perkreditan Rakyat

**Central Artha**

  
**SAPTO LIYANTORO, S.E.**  
Komisaris Utama

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maka direktur beserta unit kerja yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyusun laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada PT BPR Central Artha.

Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, maka PT BPR Central Artha membuat laporan mengenai ruang lingkup pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dilakukan selama tahun 2022. Laporan ini meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank. Agar selaras dengan ketentuan OJK maka aspek penerapan tata kelola meliputi

Pengungkapan penerapan Tata Kelola

Kepemilikan saham direksi

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham BPR

Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris Lain anggota Direksi dan atau Pemegang Saham BPR

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi dan dewan komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Frekuensi rapat dewan komisaris

Jumlah penyimpangan internal

Permasalahan hukum yang dihadapi

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penerapan Good Corporate Governance merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. Hal ini dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat dengan pencapaian sesuai dengan visi dan misi PT BPR Central Artha.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>Mengkoordinir seluruh anggota Direksi atas tugas pencapaian target sesuai Rencana Bisnis Perusahaan yang sudah ditetapkan RUPS</p> <p>Bertanggungjawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis yang telah ditetapkan</p> <p>Menetapkan penyelenggaraan dan mengevaluasi perencanaan dan pengembangan Core Bisnis Bank</p> <p>Memastikan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance perusahaan</p> <p>Mengkoordinasi dan mengevaluasi prinsip Good Corporate Governance secara konsisten dalam perusahaan</p> <p>Memastikan informasi yang terkait dengan perusahaan selalu tersedia bila diperlukan Dewan Komisaris</p> <p>Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi secara periodik sesuai ketetapan Direksi atau rapat lain sesuai usulan Direksi</p> <p>Bertanggungjawab terhadap pertumbuhan bisnis sesuai rencana bisnis yang telah ditetapkan serta pengendalian masuk dan keluarnya dana pihak ketiga</p> <p>Membuat perencanaan dan penetapan strategis dalam upaya pengembangan bisnis Bank serta perluasan jaringan kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan rencana bisnis</p> <p>Mengkoordinir dan memonitor semua aktivitas bisnis dan operasional Bank sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan</p> <p>Menyusun membuat menetapkan dan merubah visi misi serta kebijakan kebijakan sepanjang sesuai perundang undangan yang berlaku</p> <p>Membuat perencanaan dan pengembangan serta penerapan strategi anti fraud dalam pelaksanaan operasional Bank</p> <p>Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Branch Manager Marketing di semua cabang serta Senior Manager Marketing baik Marketing Kredit maupun Funding</p> <p>Mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan penanganan kredit bermasalah serta langkah penyelesaiannya</p> <p>Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas operasional di Bidang Audit Internal Marketing Kredit maupun Funding dan Analisa Kredit dan Manajemen Risiko dan Hukum serta Penanganan Penyelesaian Kredit Bermasalah PPKB</p> <p>Menyelaraskan seluruh inisiatif internal serta memastikan peningkatan kemampuan bersaing perusahaan</p> <p>Membantu tugas tugas Direksi lainnya</p>		
2.	Nama	: Bowo Susanto, S.E.
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	

	<p>Bertanggungjawab melaksanakan kebijakan Direktur Utama perihal pengelolaan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan serta Programmer dan Bidang Layanan dan Pelatihan serta HRD dan Umum</p> <p>Memimpin Bidang Umum dan Perencanaan untuk memastikan Bidang Perencanaan dan Pengembangan serta Programmer dan Bidang Layanan dan Pelatihan serta HRD dan Umum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Bertanggung jawab terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis</p> <p>Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana bisnis bagian bagian dibawahnya</p> <p>Bertanggung jawab terhadap perencanaan pengkoordinasian pengarahan pengendalian pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan serta Programmer dan Bidang Layanan dan Pelatihan serta HRD dan Umum berikut langkah langkah penanganan permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya serta kredit sesuai batas kewenangannya</p> <p>Terlaksananya penerapan strategi anti fraud dalam pelaksanaan operasional Bank</p> <p>Bertanggung jawab terhadap semua kewenangan yang sudah menjadi tanggung jawabnya masing masing sesuai kesepakatan Direksi</p> <p>Membantu tugas tugas anggota Direksi lainnya</p>	
3.	Nama	: Atika Rochyati, S.E.
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Direktur Utama perihal pengelolaan di Bidang Keuangan dan Personalia dan Kapatuhan APU PPT dan Teknologi Informasi serta Treasury</p> <p>Memimpin Bidang Operasional untuk memastikan Bank memenuhi seluruh kewajiban pelaporan ketentuan akuntansi dan layanan operasional serta memimpin di Bidang Keuangan dan Personalia dan Kapatuhan APU PPT dan Teknologi Informasi serta Bidang Treasury</p> <p>Bertanggung jawab terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis</p> <p>Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana bisnis bagian bagian dibawahnya</p> <p>Merencanakan mengkoordinasikan mengarahkan mengendalikan menerapkan mengawasi dan mengevaluasi tugas tugas operasional terkait Bidang Keuangan dan Personalia dan Kapatuhan APU PPT dan Teknologi Informasi serta Bidang Treasury berikut langkah langkah penanganan permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya</p> <p>Bertanggung jawab terhadap perencanaan pengkoordinasian pengarahan pengendalian pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan di Bidang Keuangan dan Personalia dan Kapatuhan APU PPT dan Teknologi Informasi serta Bidang Treasury</p> <p>Terlaksananya penerapan strategi anti fraud dalam pelaksanaan operasional Bank</p> <p>Bertanggung jawab terhadap semua kewenangan yang sudah menjadi tanggung jawabnya masing masing sesuai kesepakatan Direksi</p> <p>Membantu tugas tugas anggota Direksi lainnya</p>	
4.	Nama	: Forest Khrisna Tri Wasisto Ady, S.H.
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Bertanggung jawab melaksanakan kebijakan Direktur Utama perihal pengelolaan di Bidang Kredit Mikro dan Penagihan serta Remedial.</p> <p>Bertanggung jawab terhadap perencanaan pengkoordinasian pengarahan pelaksanaan pengendalian pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional di Bidang Kredit Mikro dan Penagihan serta Remedial berikut penanganan dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah</p>	

Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana bisnis bagian bagian dibawahnya  
Bertanggung jawab terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis  
Bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kredit yang menjadi tanggung jawabnya termasuk kualitas kredit dan pengendalian serta pengawasan aktivitas operasionalnya  
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan serta perkembangan kredit yang berpotensi menjadi kredit bermasalah serta langkah langkah penanganan dan penyelesaiannya  
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta aktivitas Branch Manager BM Penagihan di semua kantor cabang dan Bidang Remedial dan Bidang Penagihan serta Kredit sesuai batas kewenangannya  
Terlaksananya penerapan strategi anti fraud dalam pelaksanaan operasional Bank  
Bertanggung jawab terhadap semua kewenangan yang sudah menjadi tanggung jawabnya masing masing sesuai kesepakatan Direksi  
Membantu tugas tugas anggota Direksi lainnya

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Menyusun strategi pencapaian rencana kerja tahun 2022  
Melakukan reorganisasi dan restaffing sosialisasi kepada segenap jajaran SDM di kantor pusat maupun cabang  
Menguraikan jabatan bagi karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana  
Membina SDM melalui peningkatan program pendidikan atau training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan dan melakukan tindak lanjut dari kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi mutasi promosi demosi pemberian penghargaan pemberhentian yang dapat menekan fluktuasi keluar masuk SDM  
Melaksanakan kebijakan direksi dalam mengembangkan kredit dan pendanaan berdasarkan prinsip kehati hatian yang diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi internal kontrol dan SKAI  
Fungsi audit dilaksanakan terhadap setiap segmen kredit yang mencangkup pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip kehati hatian sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan collection sebagai bagian dari mitigasi risiko  
SDM bagian kredit menjaga kolektibilitas kredit agar tidak memburuk terutama kegiatan cash pick up pembayaran angsuran maupun tabungan disatuan kerja yang ada  
Meningkatkan kualitas layanan Bank kepada nasabah melalui pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah yang dapat memberikan nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada  
Melakukan perbaikan secara berkelanjutan continuously improvement untuk lebih mencapai tingka kepuasan nasabah yang prima customer satistaction

Penjelasan Lebih Lanjut :

Jajaran Dewan Direksi sebelum tanggal 07 Mei 2022 hanya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ismiyanto (Direktur Utama) dan Sdr. Bowo Susanto (Direktur), Sdri. Atika Rochyati (Direktur) namun berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Central Artha pada tanggal 07 Mei 2022 dan telah ditetapkan berdasarkan Akta Notaris nomor 1 tanggal 09 Mei 2022 dengan Notaris Ny. Christina Agustini, SH, Mkn di Tegal, dimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH 01.09-0011703 tanggal 11 Mei 2022, maka susunan Dewan Direksi PT. BPR Central Artha menjadi 4 (empat) orang yaitu Sdr. Ismiyanto (Direktur Utama) dan Sdr. Bowo Susanto (Direktur), Sdri. Atika Rochyati (Direktur) dan Sdr. Forest Khrisna Tri Wasisto Ady (Direktur)

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Sapto Liyantoro
	Jabatan	: Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Mengawasi dan membantu direksi dalam pengembangan bisnis dan SKAI dan Lending serta membantu tugas lainnya</p> <p>Mengawasi dan membantu direksi dalam bidang Tehnologi Informasi dan bisnis Kantor Cabang</p> <p>Memantau laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia terkait posisi perbankan moneter dan kegiatan perekonomian</p> <p>Memantau laporan keuangan khususnya posisi Neraca dan Laporan Rugi Laba yang disampaikan secara periodik dan dipublikasikan melalui berbagai media antara lain surat kabar website dll</p> <p>Menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun kecuali jika ada syarat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan</p> <p>Memantau kewajiban keuangan bank kepada pihak ketiga antara lain pembayaran pajak fee penjaminan LPS dll</p> <p>Mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan mitra kerja</p> <p>Menjaga hubungan yang baik dan beretika dengan Pemilik bank</p> <p>Membantu mewujudkan kinerja bank yang sehat dan tumbuh secara wajar</p> <p>Memantau likuiditas bank atau kelancaran operasional bank</p> <p>Memantau solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya</p> <p>Memantau Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dicapai bank</p> <p>Menjaga Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (bonafiditas)</p>		
2.	Nama	: Risnawati Handayani
	Jabatan	: Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Mengawasi dan membantu direksi dalam bidang Operasional serta membantu tugas lainnya</p> <p>Mengawasi dan membantu direksi dalam bidang Tehnologi Informasi dan bisnis Kantor Cabang</p> <p>Memantau laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia terkait posisi perbankan moneter dan kegiatan perekonomian</p> <p>Memantau laporan keuangan khususnya posisi Neraca dan Laporan Rugi Laba yang disampaikan secara periodik dan dipublikasikan melalui berbagai media antara lain surat kabar website dll</p> <p>Menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun kecuali jika ada syarat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan</p> <p>Memantau kewajiban keuangan bank kepada pihak ketiga antara lain pembayaran pajak fee penjaminan LPS dll</p> <p>Mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan mitra kerja</p> <p>Menjaga hubungan yang baik dan beretika dengan Pemilik bank</p> <p>Membantu mewujudkan kinerja bank yang sehat dan tumbuh secara wajar</p> <p>Memantau likuiditas bank atau kelancaran operasional bank</p> <p>Memantau solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya</p>		

	Memantau Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dicapai bank Menjaga Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (bonafiditas)	
3.	Nama	: Hartana Satedja
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>Mengawasi dan membantu direksi dalam pengembangan bisnis Funding dan SDM serta bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta membantu tugas lainnya</p> <p>Mengawasi dan membantu direksi dalam bidang Tehnologi Informasi dan bisnis Kantor Cabang</p> <p>Memantau laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia terkait posisi perbankan moneter dan kegiatan perekonomian</p> <p>Memantau laporan keuangan khususnya posisi Neraca dan Laporan Rugi Laba yang disampaikan secara periodik dan dipublikasikan melalui berbagai media antara lain surat kabar website dll</p> <p>Menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah dari siapapun kecuali jika ada syarat resmi dari Menteri Keuangan secara tertulis untuk keperluan perpajakan dan peradilan</p> <p>Memantau kewajiban keuangan bank kepada pihak ketiga antara lain pembayaran pajak fee penjaminan LPS dll</p> <p>Mengupayakan untuk selalu dapat memenuhi janji atau persetujuan yang telah disepakati dengan mitra kerja</p> <p>Menjaga hubungan yang baik dan beretika dengan Pemilik bank</p> <p>Membantu mewujudkan kinerja bank yang sehat dan tumbuh secara wajar</p> <p>Memantau likuiditas bank atau kelancaran operasional bank</p> <p>Memantau solvabilitas bank atau terpeliharanya kekayaan bank agar kokoh dan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya</p> <p>Memantau Rentabilitas atau tingkat keuntungan yang dicapai bank</p> <p>Menjaga Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank (bonafiditas)</p>	
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	<p>Strategi pencapaian Rencana Kerja tahun 2022</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan Direksi dalam melakukan reorganisasi dan restaffing serta sosialisasi kepada segenap jajaran SDM baik di Kantor Pusat maupun Cabang serta diimbangi oleh kejelasan dalam uraian jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana</p> <p>Pembinaan SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank yang dilakukan secara terus menerus</p> <p>Pelaksanaan kebijakan Direksi untuk mengembangkan kredit dan pendanaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi internal kontrol dan SKAI.</p> <p>SDM bagian kredit menjaga kolektibilitas kredit tidak memburuk terutama kegiatan cash pick up pembayaran angsuran maupun tabungan disatukan kerja yang ada</p> <p>Peningkatan kualitas layanan Bank kepada nasabah melalui pemberian pelayanan yang prima</p> <p>Perbaikan secara berkelanjutan continuously improvement untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima customer satisfaction</p>	
	Penjelasan Lebih Lanjut :	
	Nihil	

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Sehubungan dengan PT. BPR Central Artha dimana modal inti yang dimiliki masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka tidak wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas atau Fungsi Komite karena hanya BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) yang wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas Fungsi Komite.	

#### b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Sehubungan dengan PT. BPR Central Artha dimana modal inti yang dimiliki masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka tidak wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas atau Fungsi Komite karena hanya BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) yang wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas Fungsi Komite.	

#### c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit

Program	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
<b>2. Komite Pemantau Risiko</b>		
Program	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
<b>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</b>		
Program	:	-
Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut		
Sehubungan dengan PT. BPR Central Artha dimana modal inti yang dimiliki masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka tidak wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas atau Fungsi Komite karena hanya BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah) yang wajib memiliki kelengkapan dan pelaksana tugas Fungsi Komite.		

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.	Rp0,00	0%
2.	Bowo Susanto, S.E.	Rp0,00	0%
3.	Atika Rochyati, S.E.	Rp0,00	0%
4.	Forest Khrisna Tri Wasisto Ady	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Jajaran Direksi semuanya tidak mempunyai kepemilikan saham atas PT. BPR Central Artha			

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.	-	-	0%
2.	Bowo Susanto, S.E.	-	-	0%
3.	Atika Rochyati, S.E.	-	-	0%
4.	Forest Khrisna Tri Wasisto Ady, S.H.	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran direksi semuanya tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bowo Susanto, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Atika Rochyati, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Forest Khrisna Tri Wasisto Ady	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Direksi tidak mempunyai Hubungan Keuangan antara Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Central Artha				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ismiyanto, S.H., M.H., M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bowo Susanto, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Atika Rochyati, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Forest Khrisna Tri Wasisto Ady	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Jajaran Direksi tidak mempunyai Hubungan Keluarga antara Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Central Artha

#### D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

##### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sapto Liyantoro	Rp1.518.000.000,00	7.59%
2.	Risnawati Handayani	Rp0,00	0%
3.	Hartana Satedja	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Jajaran Dewan Komisaris, hanya Sapto Liyantoro selaku Komisaris Utama yang mempunyai kepemilikan saham atas PT. BPR Central Artha yaitu sebesar Rp. 1.518.000.000 atau 7.59%			

##### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sapto Liyantoro	-	PT. Central Maju Bersama	8%
2.	Sapto Liyantoro	-	PT. BPR Pujon Jaya Makmur	30%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Dewan Komisaris, hanya Sapto Liyantoro selaku Komisaris Utama yang mempunyai kepemilikan saham di perusahaan lain yaitu saham di PT. Central Maju Bersama sebesar 8% dan saham di PT. BPR Pujon Jaya Makmur sebesar 30%				

**E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sapto Liyantoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Risnawati Handayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Hartana Satedja	Tidak ada	Tidak ada	Muljani Wibowo - Menerima dan/ atau Memberikan Penghasilan
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Komisaris hanya Hartana Sutedja selaku Dewan Komisaris yang mempunyai hubungan keuangan dengan salah satu Pemegang Saham PT. BPR Central Artha yaitu Muljani Wibowo dalam kaitannya dengan menerima dan/atau memberikan penghasilan selaku pasangan suami/istri.				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sapto Liyantoro	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Risnawati Handayani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Hartana Satedja	Tidak ada	Tidak ada	Muljani Wibowo - Pasangan (istri)
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Jajaran Komisaris hanya Hartana Sutedja selaku Dewan Komisaris yang mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu Pemegang Saham PT. BPR Central Artha yaitu Muljani Wibowo dalam kaitannya selaku pasangan suami/istri.				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	4	Rp1.384.858.368,00	3	Rp1.501.152.576,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
<b>Total</b>			<b>Rp1.384.858.368,00</b>		<b>Rp1.501.152.576,00</b>
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga. Untuk Tahun 2022 tidak ada jenis remunerasi berupa Tunjangan, Tantiem, Kompensasi berbasis saham dan remunerasi lainnya.					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (4)	Kendaraan Dinas (3)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (4)	BPJS Kesehatan (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS adalah Fasilitas Transportasi (Kendaraan Dinas) dan Fasilitas Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan)			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8.49 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.26 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.06 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.16 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.72 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan selama 1 (satu) tahun	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	06 Januari 2022	3	Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2021
2.	07 April 2022	3	Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022
3.	07 Juli 2022	3	Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022
4.	12 Oktober 2022	3	Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
<p>Jajaran Dewan Komisaris berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Central Artha pada tanggal 07 Mei 2022 dan telah ditetapkan berdasarkan Akta Notaris nomor 1 tanggal 09 Mei 2022 dengan Notaris Ny. Christina Agustini, SH, Mkn di Tegal, dimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH 01.09-0011703 tanggal 11 Mei 2022, susunan Dewan Komisaris PT. BPR Central Artha terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Spto Liyantoro (Komisaris Utama), Sdri. Risnawati Handayani (Komisaris) dan Sdr. Hartana Satedja (Komisaris)</p>			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Sapto Liyantoro	4	0	100%
2.	Risnawati Handayani	4	0	100%
3.	Hartana Satedja	4	0	100%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Jajaran Dewan Komisaris berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Central Artha pada tanggal 07 Mei 2022 dan telah ditetapkan berdasarkan Akta Notaris nomor 1 tanggal 09 Mei 2022 dengan Notaris Ny. Christina Agustini, SH, Mkn di Tegal, dimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH 01.09-0011703 tanggal 11 Mei 2022, susunan Dewan Komisaris PT. BPR Central Artha terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Sapto Liyantoro (Komisaris Utama), Sdri. Risnawati Handayani (Komisaris) dan Sdr. Hartana Satedja (Komisaris)

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	5	11
Telah Diselesaikan		0		0		0		10
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	1
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut :

Terjadi 11 fraud sepanjang tahun 2022 yang dilakukan oleh 11 (sebelas) orang Pegawai Tidak Tetap dimana dengan status 10 (sepuluh) fraud telah diselesaikan dan 1 (satu) fraud masih dalam proses penyelesaian.

### J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Penjelasan Lebih Lanjut		
Sampai dengan akhir tahun 2022, masih ada kasus hukum yang masih dalam proses penyelesaian yaitu kasus perdata.		

### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Sepanjang tahun 2022 tidak ada data transaksi yang mengandung benturan kepentingan.							

### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	15 Agustus 2022	Sosial	Sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat, berpartisipasi dalam Program GN Lingkaran (PeduLI perlindungan peKerja RentAN) dimana program ini membantu pekerja rentan, dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk dapat melindungi	BPJS Ketenagakerjaan Tegal	Rp1.680.000,00

		diri dan keluarganya. Program ini berupaya membantu pemerintah dalam program pencegahan kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.		
<b>Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik</b>				
Sepanjang Tahun 2022 sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, PT. BPR Central Artha berpartisipasi dalam Program GN Lingkaran (PeduLI perliNDuNGan peKerja RentAN) yang digalakan BPJS Ketenagakerjaan Tegal				

### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR Central Artha  
 Alamat : Jln. Dr. Sutomo No. 53 Kota Tegal  
 Nomor Telepon : 0283 - 341741  
 Posisi Laporan : Desember 2022  
 Modal Inti : Rp31.619.314.673,00  
 Total Aset : Rp506.541.943.594,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Central Artha Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.50	0.300
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.78	0.267
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.10	0.210
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.92	0.192
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.90	0.190
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.70	0.043
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.85	0.185
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.50	0.113
10	Rencana Bisnis BPR	1.54	0.116
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.95	0.146
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.800</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.5)**

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi PT. BPR Central Artha adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Perencanaan, Direktur Operasional yang juga merupakan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta Direktur Mikro dan Remedial

Telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku,

Seluruh anggota direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.

Aspek transparansi anggota direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.78)**

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Komisaris PT. BPR Central Artha adalah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelum menjalankan tugasnya seluruh anggota dewan komisaris telah lulus fit and proper test dan diangkat melalui RUPS.

Keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai drajat kedua,

Dewan Komisaris PT BPR Central Artha tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan,

Aspek transparansi anggota dewan komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku,

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

PT. BPR Central Artha dengan modal inti masih dibawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tidak berkewajiban untuk adanya Keiengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite, karena kewajiban hanya dikenakan pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.1)**

PT. BPR Central Artha Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif.

Belum pernah terjadi benturan kepentingan, jika terjadi akan diungkap dalam setiap keputusan dan dilengkapi dengan risalah rapat serta diadministrasikan serta terdokumentasi,

Selama ini dan sepanjang Tahun 2022 belum terjadi benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank,

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.92)**

PT. BPR Central Artha sudah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan juga sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan. Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, Memiliki ketentuan internal mengenai penerapan fungsi kepatuhan, namun belum mencakup seluruh satuan kerja dan masih dilakukan pengkinian serta penyempurnaan.

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.9)**

PT. BPR Central Artha sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bekerja secara independent serta obyektif. Pelaksanaan fungsi audit internal bank telah berjalan efektif, serta pedoman internal telah sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dan disetujui direksi dan dewan komisaris. Belum sepenuhnya melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit internal. Terus melakukan menyempurnakan dan pengkinian pelaksanaan fungsi audit internal sehingga terpenuhi secara memadai dan independen, Adanya pelaporan pelaksanaan audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris,

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.7)**

PT. BPR Central Artha telah menunjuk dan menugaskan akuntan publik/ audit eksternal (KAP) sesuai ketentuan POJK dengan melalui RUPS. Pelaksanaan audit oleh akuntan publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. Kualitas dan cakupan hasil audit akuntan publik sangat baik, Pelaksanaan audit dilakukan oleh akuntan publik (KAP) sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan,

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.85)**

PT. BPR Central Artha sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan telah memiliki pedoman kerja pelaksanaan manajemen risiko sesuai peraturan perundang-undangan. Bank memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan dan penerapan manajemen risiko secara tertulis sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaannya. BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK. BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.5)**

PT. BPR Central Artha Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, Tidak ada pelanggaran BMPK dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent). Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/ debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.54)**

Rencana bisnis PT. BPR Central Artha Tahun 2022 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR serta sudah didukung para Pemegang Saham dengan mempertimbangkan factor-faktor internal dan eksternal serta prinsip kehati-hatian (prudent).

Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis tetap dilakukan dewan komisaris.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.95)**

Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.

Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, terkini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem informasi manajemen bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Pemeringkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

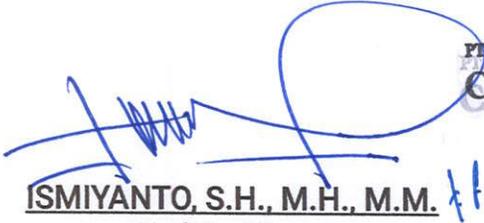
Nilai Komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik.

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Central Artha Tahun 2022 pada dasarnya merupakan seuruh proses kerja (business process) PT. BPR Central Artha selama 1 (satu) tahun. Proses kerja tersebut melalui pendekatan pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada di PT. BPR Central Artha sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal serta tidak ada penyimpangan/peleanggaran atas kebijakan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan pedoman Good Corporate Governance GCG internal bertujuan untuk mengingatkan segenap organisasi untuk keseiuruhan tingkatan dan jenjang organisasi yang ada pada PT. BPR Central Artha agar senantiasa melaksanakan prinsip Good Corporate Governance GCG dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. Tingkatan dan jenjang organisasi ini berupa dewan komisaris, direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Pemberlakuan pedoman tersebut diharapkan mampu lebih mendorong direksi dengan segenap jajarannya untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pada saat yang bersamaan dewan komisaris melakukan pengawasan secara efektif, profesional, transparansi dan akuntabilitas.

Tegal, 25 Januari 2023

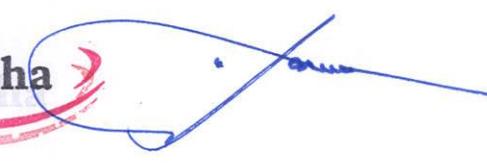
**PT. BPR Central Artha**

  
**ISMIYANTO, S.H., M.H., M.M.**

Direktur Utama

PT. Bank Perkreditan Rakyat

**Central Artha**

  
**SAPTO LIYANTORO, S.E.**

Komisaris Utama